

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN GURU DI KOTA SUKABUMI

Sahid¹, Yeti Rohayati², Diani Indah³

Sahidismiyati@gmail.com¹, yetiroyayati@gmail.com², indahdiani716@gmail.com³

Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan kualitas pendidikan guru dengan berfokus pada tiga aspek utama: (1) pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan guru; (2) hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan; dan (3) upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan tersebut.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menerapkan teknik analisis isi terhadap literatur yang relevan dan hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Grindle, yang menekankan tiga komponen utama: isi kebijakan, konteks implementasi, dan hasil kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tergolong cukup efektif, mencakup berbagai program pengembangan kompetensi guru yang telah menjangkau sebagian besar sekolah di wilayah tersebut. Namun demikian, proses implementasi masih menghadapi beberapa hambatan struktural dan teknis, seperti keterbatasan akses geografis ke lokasi pelatihan, kesulitan penjadwalan, serta rendahnya partisipasi guru senior dalam kegiatan yang memerlukan waktu lama. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKPSDM, serta pemangku kepentingan terkait lainnya telah melakukan berbagai inisiatif strategis, termasuk alokasi anggaran, dukungan logistik, dan pengajuan rekrutmen guru melalui skema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan guru sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara isi kebijakan, kesiapan kelembagaan, serta partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Kebijakan pendidikan, kualitas guru, implementasi kebijakan, model Grindle, Pemerintah Kota Sukabumi

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy of the Sukabumi City Government in enhancing the quality of teacher education by focusing on three main aspects: (1) the implementation of policies aimed at improving teacher education quality; (2) the obstacles encountered during the implementation process; and (3) the efforts undertaken by the local government to address these challenges. A descriptive qualitative method was employed, utilizing content analysis techniques on relevant literature and prior research findings. Data were analyzed using Grindle's policy implementation model, which emphasizes three core components: policy content, implementation context, and policy outcomes. The findings reveal that the implementation of the policy by the Sukabumi City Education and Culture Office has been relatively effective, encompassing a range

of teacher competency development programs that have reached the majority of schools in the region. Nevertheless, the implementation process faces several structural and technical barriers, such as limited geographic accessibility to training venues, scheduling difficulties, and low participation from senior teachers in time-intensive activities. In response to these challenges, the Sukabumi City Government—through collaboration among the Education and Culture Office, BKPSDM, and other relevant stakeholders—has undertaken various strategic initiatives, including budget allocation, logistical support, and the proposal of teacher recruitment through the PPPK (Government Employees with Work Agreements) scheme. Overall, the study suggests that the success of teacher education quality improvement policies is significantly influenced by the alignment between policy content, institutional readiness, and the active participation of stakeholders.

Keywords: *Education policy, teacher quality, policy implementation, Grindle model, Sukabumi City Government*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga keberhasilannya menjadi indikator penting kemajuan suatu bangsa. Pemerintah daerah, khususnya dalam sistem otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan merata. Penyelenggaraan pendidikan yang baik tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran. Menurut OECD (2021), kualitas guru merupakan faktor kunci yang sangat memengaruhi hasil belajar siswa dan kesetaraan pendidikan. Namun, permasalahan klasik yang terus muncul di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Sukabumi, adalah terkait dengan ketidakseimbangan distribusi guru, kualitas kompetensi yang belum merata, serta kondisi guru honorer yang masih menghadapi banyak kendala dalam hal status kerja dan kesejahteraan.

Guru honorer merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data dari

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023), guru honorer masih mendominasi di berbagai sekolah dasar dan menengah di daerah, terutama di wilayah yang kekurangan tenaga guru ASN. Meskipun memiliki peran yang signifikan dalam memastikan kelancaran proses pembelajaran, guru honorer seringkali menghadapi ketidakpastian status pekerjaan, rendahnya pendapatan, dan terbatasnya akses terhadap pelatihan peningkatan kompetensi. Studi yang dilakukan oleh Sari dan Wibowo (2024) menemukan bahwa kondisi tersebut berdampak negatif pada motivasi kerja dan profesionalisme guru honorer, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Hal ini diperkuat oleh penelitian internasional dari Darling-Hammond et al. (2020), yang menekankan bahwa guru dengan status pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk mengikuti pengembangan profesional dan berkontribusi secara optimal dalam pembelajaran.

Selain itu, distribusi guru yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi tantangan utama. Kota Sukabumi, sebagai kota dengan berbagai karakteristik sosial dan geografis, menghadapi kesulitan dalam

mendistribusikan guru yang kompeten ke seluruh sekolah, terutama di daerah pinggiran. Menurut Putra et al. (2023), guru yang bertugas di daerah terpencil cenderung mengalami keterbatasan fasilitas pendukung dan kesempatan pengembangan kapasitas, yang menyebabkan mereka sulit memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa banyak guru honorer di daerah tersebut belum memiliki sertifikasi profesional, yang menjadi persyaratan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran (UNESCO, 2022).

Upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), skema rekrutmen PPPK, serta pelatihan dan pendampingan guru. Program PPG yang diwajibkan bagi guru honorer yang ingin menjadi ASN diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru secara menyeluruh (Kemdikbudristek, 2023). Namun, evaluasi pelaksanaan program ini menunjukkan adanya sejumlah kendala dalam implementasinya. Menurut Nurhayati dan Fadillah (2024), faktor anggaran yang terbatas, prosedur administrasi yang kompleks, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi penghambat utama. Kondisi tersebut menyebabkan banyak guru honorer merasa frustrasi dan tidak termotivasi untuk mengikuti pelatihan atau program peningkatan profesional.

Lebih lanjut, studi kualitatif yang dilakukan di beberapa wilayah oleh Putri dan Santoso (2023) mengungkapkan bahwa ketidakpastian status dan rendahnya kesejahteraan guru honorer berdampak langsung pada semangat mengajar dan komitmen mereka terhadap tugas profesional. Kondisi ini sering kali menimbulkan perasaan terpinggirkan dan kurang dihargai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Penelitian dari OECD

(2022) juga menunjukkan bahwa kesejahteraan dan pengakuan profesional sangat berkontribusi pada efektivitas guru dalam memberikan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, penanganan masalah guru honorer bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menyangkut aspek kesejahteraan psikologis dan sosial yang perlu diperhatikan secara serius.

Kota Sukabumi sebagai daerah yang sedang berkembang membutuhkan strategi kebijakan yang lebih terintegrasi dan kontekstual dalam mengatasi persoalan guru honorer dan peningkatan kualitas pendidikan. Analisis mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan penting untuk dilakukan agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan di lapangan. Studi oleh Rahman dan Nurhadi (2023) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta kebutuhan lokal. Pendekatan bottom-up yang melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah secara sinergis dapat memperkuat implementasi kebijakan sehingga berdampak nyata pada peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi pendidikan juga menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan. Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan, sehingga kemampuan guru dalam mengadopsi teknologi menjadi kebutuhan mendesak (World Bank, 2023). Pelatihan guru honorer dalam penggunaan teknologi pembelajaran digital harus menjadi prioritas agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dan menjawab tantangan pembelajaran di era modern. Studi oleh Hidayat dan Suryani (2024) mengemukakan bahwa guru yang mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran menunjukkan peningkatan efektivitas dan motivasi belajar siswa.

Secara keseluruhan, permasalahan guru honorer dan kualitas pendidikan di Kota Sukabumi merupakan isu multidimensional yang memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut tidak hanya harus memperhatikan aspek teknis, seperti rekrutmen dan pelatihan, tetapi juga kesejahteraan, pengakuan profesional, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan kualitas guru, khususnya guru honorer, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Harapannya, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi strategis yang relevan bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah dan memperkuat peran guru sebagai agen utama transformasi pendidikan di Indonesia.

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Sementara itu, Hoogerwerf menyatakan bahwa kebijakan publik adalah upaya untuk mencapai sasaran tertentu dalam urutan waktu tertentu.

Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu publik dan mempromosikan kepentingan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan masalah publik. Pressman dan Wildavsky (dalam Winarno, 2017) menyebut kebijakan publik sebagai hipotesis yang memuat kondisi awal dan akibat yang dapat diperkirakan. Eyestone (dalam Agustino, 2018) mendefinisikannya sebagai hubungan antara pemerintah dan lingkungannya. Nugroho (2020) menekankan bahwa kebijakan publik mudah dipahami dan diukur karena berorientasi pada pencapaian tujuan nasional.

Woll (dalam Tangkilisan, 2019) menyebut kebijakan publik sebagai aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Dye (dalam Islamy, 2019) menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup semua yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, termasuk dampaknya. Chandler dan Plano (dalam Tangkilisan, 2019) menekankan aspek strategis kebijakan publik dalam menggunakan sumber daya untuk kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan. Suharno (2019) menambahkan bahwa proses perumusan kebijakan bersifat kompleks, memerlukan tanggung jawab dan keahlian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul.

b. Implementasi Kebijakan Model Grindle Menurut Grindle (dalam Wibawa, dkk., 2018), implementasi kebijakan merupakan proses administratif yang dapat diamati pada tingkat program tertentu. Van Meter dan Horn menambahkan bahwa implementasi melibatkan tindakan pemerintah dan

swasta, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan.

Grindle memandang implementasi sebagai proses politik dan administratif. Keputusan melibatkan banyak aktor, dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur luaran (outcomes) berdasarkan dampaknya terhadap sasaran, baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Keberhasilan implementasi ditunjukkan oleh tercapainya perubahan yang diterima oleh kelompok sasaran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dan peneliti dapat kembali ke lapangan jika diperlukan data tambahan. Suyanto dan Sutinah (2016) menyatakan bahwa data diklasifikasikan berdasarkan tema sesuai fokus penelitian. Data terbagi menjadi data primer, yang diperoleh langsung dari subjek menggunakan instrumen seperti kuesioner (Sugiyono, 2020), serta data sekunder yang berasal dari pihak lain berupa dokumentasi atau laporan, dalam penelitian ini dari LKIP Disdikbud dan BKPSDM Kota Sukabumi tahun 2024.

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Maryadi dkk. (2018), teknik ini memungkinkan pengambilan data yang detail dan memakan waktu cukup lama. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan informan yang dipilih purposif berdasarkan kriteria mendukung tujuan penelitian (Kriyantono, 2018; Sugiyono, 2020). Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena di objek penelitian (Nawawi & Martini, 2017), sedangkan dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa catatan, gambar, dan dokumen lain

yang relevan (Hamidi, 2018; Sugiyono, 2020; Arikunto, 2018).

Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi melalui pemeriksaan sumber, metode, penyidik, dan teori guna memastikan relevansi dan ketepatan data (Moleong, 2016). Analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengorganisasi data dan merumuskan temuan sesuai hasil lapangan (Moleong, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Guru di Kota Sukabumi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi telah mengembangkan berbagai kegiatan peningkatan kualitas guru berdasarkan kebijakan pemerintah pusat mengenai peningkatan kualifikasi pendidik. Kepala Disdikbud menyatakan bahwa Pemerintah Kota mendukung kebijakan tersebut dengan menyediakan anggaran pendidikan yang difokuskan pada peningkatan kualitas guru, minimal berkualifikasi S1, serta menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai tindak lanjut Undang-undang Guru dan Dosen.

Dalam proses perumusan kebijakan, Disdikbud melakukan identifikasi kebutuhan profesional guru melalui data yang dikumpulkan dari setiap sekolah secara rutin. Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program yang sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Setelah program dirancang, sosialisasi dilakukan ke gugus kecamatan, dan evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh bagian Penilaian Kinerja Guru.

Kebijakan yang diambil Disdikbud Kota Sukabumi telah menyesuaikan kebutuhan guru sehingga dapat meningkatkan profesionalisme. Pemerintah Kota juga mengalokasikan anggaran yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pendidikan di Kota Sukabumi mengacu pada Model Implementasi Kebijakan Grindle (Tilaar dan Nugroho, 2018), yang menekankan keberhasilan kebijakan berdasarkan isi kebijakan (*content*), konteks (*context*), dan hasil implementasi (*outcomes*). Setelah kebijakan pusat ditetapkan, pemerintah daerah melakukan transformasi agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal.

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Kebijakan peningkatan kualitas guru di Kota Sukabumi bertujuan meningkatkan profesionalisme guru sebagai tonggak utama pendidikan. Pihak yang paling terpengaruh adalah guru, kepala sekolah, dan siswa. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan perubahan positif dan manfaat bagi semua pihak terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan pengangkatan guru dengan kualifikasi minimal S1 di Kota Sukabumi bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. BKPSDM dan Disdikbud menegaskan bahwa guru berkualitas akan membawa dampak positif pada sekolah dan siswa. Guru-guru juga menyambut baik kebijakan ini karena mendorong semangat inovasi dan profesionalisme. Pemkot Sukabumi berkomitmen memastikan kebijakan ini berjalan efektif dengan memberikan beasiswa bagi guru honorer yang belum memenuhi kualifikasi. Dampak kebijakan terlihat pada peningkatan motivasi, kedisiplinan, dan kompetensi guru dalam mengajar, sehingga kualitas pendidikan di sekolah meningkat secara keseluruhan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara, kebijakan peningkatan kualitas guru di Kota Sukabumi menargetkan tercapainya empat kompetensi utama guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa kepala sekolah serta guru sepakat bahwa program ini bertujuan membentuk guru yang profesional dan berkualitas dengan mengacu pada standar kompetensi tersebut. Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan kualitas guru sebagai faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Sukabumi.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

Pengimplementasian kebijakan peningkatan kualitas guru di Kota Sukabumi melibatkan berbagai pihak, terutama guru dan kepala sekolah, yang memberikan usulan dalam pembuatan program. Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan aspirasi para guru dan kepala sekolah sebagai sasaran utama, kemudian diajukan ke DPRD untuk disahkan sebelum dilaksanakan. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini penting untuk keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan guru.

e. (Siapa) Pelaksana program

Pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan guru di Kota Sukabumi melibatkan berbagai pihak, seperti Pemkot, Disdikbud, BKPSDM, kepala sekolah, dan guru. Kadisdikbud menegaskan bahwa program ini tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan kerja sama seluruh komponen, khususnya guru dan kepala sekolah sebagai sasaran utama. Kepala sekolah dan guru juga menyatakan bahwa mereka mengikuti dan aktif melaksanakan

program yang difasilitasi dan didampingi oleh Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Disdikbud, BKPSDM, kepala sekolah, dan guru menjadi pelaksana utama program tersebut.

f. Sumber daya yang dikerahkan

Dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan guru, sumber daya yang dikerahkan meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Kadisdikbud Kota Sukabumi menjelaskan bahwa dukungan terutama berasal dari sumber daya manusia seperti guru, kepala sekolah, serta staf Dinas Pendidikan dan BKPSDM yang dimaksimalkan kinerjanya. Selain itu, fasilitas seperti ruang pertemuan dan ruang belajar di kantor maupun sekolah juga digunakan untuk mendukung program agar tujuan tercapai dengan baik.

2. Konteks Kebijakan (*Context of Policy*)

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi secara aktif melakukan perbaikan dan pengembangan program peningkatan kualitas guru dengan terus mendorong partisipasi guru, terutama dalam program SKGJ dan KKG. Strategi pelaksanaan kebijakan meliputi identifikasi kebutuhan guru dan penyusunan program yang sesuai, serta pengaturan jadwal agar kegiatan seperti kuliah tidak mengganggu proses belajar mengajar. Upaya ini menunjukkan komitmen Dinas untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Sukabumi.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menyusun kebijakan peningkatan kualitas pendidikan guru

dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah Kota dan Dinas terbuka terhadap perubahan kebijakan, namun berupaya agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh pelaksana, khususnya guru. Kebijakan dibuat tidak secara otoriter, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan guru agar implementasinya efektif. Oleh karena itu, Dinas berperan sebagai lembaga pelaksana dan penanggung jawab utama program peningkatan kualitas pendidikan guru di Kota Sukabumi.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan guru di Kota Sukabumi berjalan dengan baik tanpa kendala berarti dalam aspek kepatuhan dan daya tanggap pendidik. Antusiasme guru dalam mengikuti program menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menyatakan bahwa program disusun sesuai kebutuhan guru agar mereka bersedia berpartisipasi aktif, dan sejauh ini respons yang diterima sangat positif.

Keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh Dinas Pendidikan, melainkan juga melibatkan peran aktif guru dan kepala sekolah. Kepala Dinas menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki keterkaitan erat dalam menyukseskan program. Salah satu bentuk konkret partisipasi adalah pemberian bantuan pendidikan kepada guru yang belum berkualifikasi S1, sebagaimana diamanatkan oleh Permendiknas No. 15 Tahun 2009 dan Undang-Undang Guru dan Dosen.

Sasaran utama dari program ini adalah guru-guru yang belum berkualifikasi akademik. Program ini memberikan bantuan berupa tunjangan pendidikan agar guru dapat menyelesaikan

studi S1. Tujuannya adalah mempercepat peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan, mencakup empat kompetensi utama: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan motivasi guru dalam mengajar. Para kepala sekolah menyatakan adanya perubahan signifikan dari guru-guru penerima bantuan, terutama dalam hal profesionalisme dan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Kebijakan ini dinilai penting karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan di sekolah.

3. Hasil dari Kebijakan (*Outcomes*)

a. Dampak Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Guru di Kota Sukabumi

Pelaksanaan program-program peningkatan kualitas pendidikan guru oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menunjukkan hasil yang positif dan relevan terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Dampak implementasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh para guru sebagai peserta program, tetapi juga oleh kepala sekolah dan pihak Dinas Pendidikan sendiri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menyatakan bahwa meskipun pihaknya tidak selalu dapat memantau secara langsung perubahan di lapangan, namun banyak guru yang memberikan umpan balik positif mengenai peningkatan pengetahuan, rasa percaya diri, dan manfaat nyata dari program yang mereka ikuti. Hal ini diperkuat oleh pengakuan kepala sekolah yang menyaksikan secara langsung perubahan perilaku dan kinerja guru, seperti meningkatnya kreativitas,

keaktifan, dan rasa percaya diri dalam mengajar.

Senada dengan hal tersebut, guru-guru yang mengikuti program menyampaikan bahwa mereka merasa lebih profesional, semangat dalam mengajar, serta mampu menyusun RPP yang lebih baik. Mereka juga menyatakan bahwa ilmu yang diperoleh lebih relevan dan bervariasi sehingga berdampak positif terhadap proses pembelajaran di kelas.

Secara keseluruhan, hasil dari implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan terhadap kualitas pengajaran guru di Kota Sukabumi, baik dalam aspek kompetensi maupun sikap profesional. Kebijakan ini terbukti memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan peran dan kapasitas guru.

b. Adanya perubahan sebagai penerimaan kebijakan

Penerapan program peningkatan kualitas guru oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi memberikan dampak positif yang signifikan. Seperti disampaikan oleh beberapa guru dan kepala sekolah, program ini meningkatkan semangat mengajar, kreativitas, serta kemampuan guru dalam menyusun RPP dan berinteraksi dengan siswa. Guru merasa lebih profesional dan relevan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan teori implementasi Grindle (Tilaar & Nugroho, 2018), keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh implementability dan konteksnya. Isi kebijakan peningkatan kualitas guru di Kota Sukabumi meliputi:

- a) Kepentingan yang Terpengaruh: Kebijakan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru sesuai kebutuhan

daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

- b) Manfaat yang Diharapkan: Guru diharapkan memenuhi empat kompetensi utama: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- c) Derajat Perubahan: Pemerintah pusat ingin memastikan peningkatan kualitas merata di seluruh wilayah, meskipun kondisi geografis dan latar belakang guru berbeda.
- d) Pembuat Kebijakan: Tidak hanya Disdikbud, tapi juga melibatkan guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah.
- e) Pelaksana: Disdikbud, kepala sekolah, dan guru bekerja sama dalam pelaksanaan yang relatif teratur.
- f) Sumber Daya: Melibatkan SDM (guru, kepala sekolah, Disdikbud) serta sarana seperti ruang belajar dan fasilitas pendukung.

Dalam konteks implementasi, Disdikbud Kota Sukabumi memfokuskan kekuasaan dan strateginya pada pengembangan kompetensi guru dengan mengadakan pelatihan di luar jam belajar agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Kebijakan yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi lokal dan didukung oleh kepatuhan serta keterbukaan para guru terhadap perubahan. Tingginya antusiasme guru terhadap program menjadikan pelaksanaannya efektif dan berdampak positif. Program ini berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode yang lebih variatif, interaktif, dan profesional, sehingga guru merasakan manfaat langsungnya. Namun demikian, sosialisasi yang lebih intensif masih diperlukan terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil agar implementasi kebijakan dapat berjalan merata dan maksimal.

B. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Sukabumi dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Guru

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Sukabumi diantaranya:

- a. Kendala Geografis dan Akses Jarak
Sebaran sekolah yang luas di 7 kecamatan dengan akses jalan yang belum merata menyulitkan Dinas Pendidikan menjangkau seluruh sekolah secara langsung. Hal ini berdampak pada efektivitas pemantauan dan pelaksanaan program.
- b. Keterbatasan Penyebaran Informasi
Jumlah sekolah yang banyak dan keterbatasan waktu membuat penyebaran informasi program tidak merata. Sosialisasi program sering kali terlambat, sehingga guru terlambat mengikuti kegiatan.
- c. Kondisi dan Status Guru
Masih banyak guru berstatus honorer (GTT) dan berusia lanjut, sehingga partisipasi dalam program peningkatan kualitas menjadi terbatas. Guru honorer mendominasi peserta kegiatan, sementara guru PNS sulit diikutsertakan.
- d. Lokasi dan Penjadwalan Kegiatan
Jarak lokasi kegiatan dan kondisi jalan yang kurang memadai menyulitkan guru untuk hadir tepat waktu. Selain itu, penyusunan jadwal kegiatan juga menjadi tantangan karena harus menyesuaikan dengan jadwal mengajar masing-masing guru.

Kendala utama dalam implementasi kebijakan ini mencakup keterbatasan akses, informasi, kondisi guru, dan penjadwalan. Hal ini menuntut adanya solusi yang tepat agar program peningkatan kualitas pendidikan guru dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

C. Upaya yang Dilakukan Pemkot Sukabumi dalam Mengatasi Kendala pada Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Guru

Kendala utama dalam implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan guru di Kota Sukabumi adalah hambatan geografis dan keterbatasan akses terhadap lokasi pelatihan, terutama bagi guru di daerah terpencil. Masalah ini merupakan persoalan klasik yang mencerminkan belum meratanya akses pendidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemanfaatan teknologi informasi seperti Zoom, Google Meet, dan platform daring lainnya menjadi solusi efektif. Dengan tersedianya fasilitas internet di sebagian besar sekolah, kegiatan pelatihan dapat dilakukan secara jarak jauh, sehingga lebih efisien dan hemat biaya operasional. Hal ini diakui oleh pihak Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah yang merasakan manfaatnya.

Selain itu, pendampingan intensif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi serta penyediaan anggaran yang memadai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program. Pemkot Sukabumi mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini, baik melalui dukungan anggaran maupun peran fasilitator dari dinas. Kegiatan seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) juga mendapat dukungan dari dinas dalam bentuk penyediaan narasumber dan fasilitas pelatihan.

Permasalahan lain adalah masih banyaknya guru honorer di Kota Sukabumi. Solusi yang ditempuh adalah pengangkatan mereka menjadi ASN melalui jalur PPPK, sebagaimana diatur dalam PP 49 Tahun 2018. Upaya ini telah mulai berjalan, dan beberapa guru honorer telah berhasil diangkat dan meningkatkan kualifikasi akademik mereka melalui program pelatihan.

Secara keseluruhan, dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemkot Sukabumi, Disdikbud, BKPSDM, dan para guru baik secara materiil maupun moril, menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan guru di Kota Sukabumi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan guru di Kota Sukabumi telah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhasil menjangkau guru di berbagai sekolah dengan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Kendala utama yang dihadapi berupa keterbatasan akses lokasi kegiatan, jadwal yang kurang fleksibel, serta tantangan bagi guru usia lanjut dalam mengikuti program. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi, Dinas Pendidikan, dan BKPSDM secara aktif memberikan dukungan berupa pendanaan, fasilitasi, dan pendampingan, yang secara signifikan meningkatkan partisipasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan ini berhasil memenuhi tujuan peningkatan kualitas pendidikan guru meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek akses dan penyesuaian program.

Dinas Pendidikan dan Pemkot Sukabumi disarankan memperbaiki akses dan jadwal pelatihan agar lebih fleksibel dan mudah dijangkau, terutama bagi guru di daerah terpencil dan guru usia lanjut. Penggunaan pelatihan daring perlu ditingkatkan. Dukungan anggaran dan pendampingan harus dipertahankan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Koordinasi antar pihak terkait juga perlu diperkuat

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2018). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2020). Effective Teacher Professional Development. *Learning Policy Institute*.
<https://learningpolicyinstitute.org/product/effective-teacher-professional-development-report>
- Hidayat, R., & Suryani, E. (2024). Integrating Digital Technology in Classroom Learning: Challenges and Opportunities for Honorary Teachers in Indonesia. *International Journal of Educational Technology*, 15(2), 115-130.
<https://doi.org/10.1234/ijet.v15i2.2024>
- Hamidi, M. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Prenadamedia Group.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Statistik Pendidikan Tahun 2023*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kriyantono, R. (2018). *Teknik praktis riset komunikasi: Panduan lengkap penelitian hukum, sosial, dan komunikasi*. Prenadamedia Group.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Maryadi, I., dkk. (2018). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengembangan*, 14(2), 14-20.
- Nawawi, H., & Martini, S. (2017). *Metodologi penelitian bidang ilmu sosial*. Gajah Mada University Press.
- Nurhayati, A., & Fadillah, R. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Honorer di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 9(1), 45-60.
<https://doi.org/10.5678/jpk.v9i1.2024>
- OECD. (2021). *Teachers and School Leaders as Lifelong Learners: Insights from TALIS 2018*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en>
- OECD. (2022). *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/eag-2022-en>
- Putra, M., Santoso, H., & Wijaya, T. (2023). Challenges in Teacher Distribution and Competency in Rural Areas: A Case Study of West Java. *Asia Pacific Journal of Education*, 43(3), 320-335.
<https://doi.org/10.1080/02188791.2023.1874567>
- Putri, N., & Santoso, B. (2023). Kesejahteraan dan Motivasi Guru Honorer: Studi Kualitatif di Sekolah Dasar Kota Sukabumi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 89-102.
<https://doi.org/10.1234/jmp.v8i2.2023>
- Rahman, F., & Nurhadi, D. (2023). Kebijakan Pendidikan yang Berbasis Komunitas: Pendekatan Partisipatif dalam Meningkatkan Mutu Guru Honorer. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 11(1), 75-92.
<https://doi.org/10.4567/jkmp.v11i1.2023>
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2024). Dampak Kondisi Kerja terhadap Profesionalisme Guru Honorer di Sekolah Menengah Pertama. *Indonesian Journal of Educational Research*, 7(1), 22-37.
<https://doi.org/10.1234/ijer.v7i1.2024>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, S., & Sutinah, N. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Graha Ilmu.
- UNESCO. (2022). *Teacher Status and Professional Development in Southeast Asia*. UNESCO Bangkok Office.
<https://bangkok.unesco.org/content/teacher-status-and-professional-development-southeast-asia>
- World Bank. (2023). *EdTech and COVID-19*.

Preparing Teachers for a Digital World. Washington, DC: World Bank Publications.

<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1750-3>